

Refleksi Hari Perempuan Internasional

8 MARET 2025

DARI LATAR KE LAYAR

“Tanpa wanita takkan ada bangsa manusia. Tanpa bangsa manusia takkan ada yang memuji kebesaranMu. Semua puji-pujian untukMu dimungkinkan hanya oleh titik darah, keringat dan erang kesakitan wanita yang sobek bagian badannya karena melahirkan kehidupan.”

— Pramoedya Ananta Toer, Jejak Langkah

Kutipan ini bukan sekadar ungkapan puitis, tetapi sebuah pengingat bahwa di balik setiap kemajuan, selalu ada pengorbanan perempuan. Perempuan adalah mula-mula kehidupan, pusat dari keberlanjutan peradaban. Namun ironisnya, kerap menjadi sosok yang paling sering diabaikan dalam sejarah. Sedemikian penting peran perempuan sehingga ada begitu banyak hari yang didedikasikan untuk mereka—seolah dunia ingin mengabadikan keberadaan mereka dalam peringatan dan perayaan. Hari Ibu, Hari Anak Perempuan Internasional, Hari Kanker Serviks, Hari Kartini, Hari Kanker Payudara, Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk hari ini: Hari Perempuan Internasional. Rentetan peringatan ini mencerminkan betapa besar kontribusi sekaligus tantangan yang dihadapi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan—dari kesehatan, pendidikan, hingga hak-hak dasar hidup mereka. Namun, di balik hari peringatan itu, patut direnungkan, sejauh mana eksistensi perempuan benar-benar diakui? Apakah penghormatan terhadap mereka hanya sebatas perayaan tahunan atau benar-benar mengubah struktur sosial yang selama ini menempatkan mereka dalam bayang-bayang?

Hari Perempuan Internasional (HPI) yang diperingati setiap 8 Maret seharusnya lebih dari sekadar seremoni. Momen ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali pencapaian yang telah diraih dan tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan—dari ketidakadilan ekonomi hingga kekerasan berbasis gender. Lebih dari itu, HPI seharusnya mampu menjadi ruang refleksi kolektif—apakah kita hanya merayakan simbolisme atau benar-benar berjuang untuk perubahan? Dalam ruang-ruang kehidupan, dari dapur hingga parlemen, dari latar sejarah hingga layar media, perempuan terus berupaya menegaskan eksistensinya. Mereka bukan sekadar tokoh pendamping, melainkan pilar utama yang menggerakkan masyarakat, membentuk peradaban, dan merawat keberlanjutan hidup. Lantas, apakah kita sebagai masyarakat sudah cukup memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan berkarya?

Perjalanan Panjang Menuju Kesetaraan

Sejarah HPI berakar pada perjuangan hak-hak perempuan dalam dunia kerja, pendidikan, dan politik. Pada tahun 1908, ribuan perempuan turun ke jalan di New York, menuntut jam kerja lebih pendek, upah layak, dan hak pilih politik. Momentum ini menginspirasi peringatan HPI pertama pada tahun 1911 di beberapa negara Eropa, sebagai wujud perlawanan terhadap sistem yang mengekang perempuan dalam berbagai sektor. Perjuangan belum usai, pada tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperkuat advokasi hak-hak perempuan dalam kebijakan dan masyarakat.

Meski telah diakui secara global, perjalanan menuju kesetaraan masih jauh dari selesai. Angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, kesenjangan ekonomi tetap menjadi masalah, kematian ibu saat melahirkan masih mengkhawatirkan akibat akses layanan kesehatan yang belum merata, keterbatasan ruang berekspresi masih menjadi tantangan bagi perempuan di berbagai lapisan sosial, dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan masih menghadapi banyak hambatan, baik di sektor publik maupun swasta. Diperburuk dengan akses pendidikan yang terbatas bagi anak perempuan di daerah tertinggal, serta maraknya pernikahan usia dini yang menghambat perkembangan generasi muda. Kebijakan yang berpihak pada perempuan sering kali masih sebatas wacana tanpa implementasi nyata, sementara budaya patriarki yang mengakar tetap menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh haknya secara penuh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat bahwa perempuan masih menerima upah sekitar 23% lebih rendah dibanding laki-laki dalam pekerjaan dengan posisi yang setara. Selain itu, hanya 20% kursi parlemen yang diduduki oleh perempuan, hal itu mencerminkan keterbatasan representasi dan kontribusi pikiran perempuan dalam politik. Tanpa aksi nyata, peringatan ini berisiko menjadi sekadar 'tokenisme'—pengakuan simbolis tanpa dampak substantif.

Idealnya, HPI bukan hanya perayaan, tetapi panggilan untuk terus memperjuangkan hak-hak yang seharusnya sudah lama menjadi milik perempuan. Lebih dari sekadar simbol, HPI harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga diperhitungkan dalam setiap keputusan yang membentuk masa depan dunia.

Perempuan dalam Seni dan Budaya

Ketimpangan yang dialami perempuan tak hanya terjadi dalam sektor ekonomi dan politik, tetapi juga menyusup sampai dunia seni dan budaya. Sejak lama, perempuan telah berkontribusi dalam kemajuan seni dan kebudayaan, tetapi pengakuan yang mereka terima sering kali tidak setara dengan laki-laki. Kanon sejarah seni baik dunia maupun Indonesia, cenderung menilai karya-karya seni perempuan "sekunder" dibandingkan dengan karya laki-laki.

Di Indonesia, ada nama-nama seperti Emiria Soenassa, yang berani menyuarakan keresahan lewat seni lukisnya di era kolonial; Arahmaiani, seorang seniman kontemporer yang mengkritik ketidakadilan sosial dan posisi perempuan melalui seni performans; serta Dolorosa Sinaga, pematung yang karya-karyanya menggambarkan ketangguhan perempuan dalam menghadapi represi dan ketidakadilan. Mereka memperjuangkan posisi perempuan dalam seni, menyoroti pengalaman serta identitas perempuan dalam masyarakat yang masih sarat ketimpangan. Namun, lagi-lagi, data dari Museum Nasional Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 70% koleksi seni rupa yang dipamerkan berasal dari seniman laki-laki, memperlihatkan bias struktural yang masih kuat. Sama halnya dengan historiografi seni Indonesia yang dimulai dari Raden Saleh hingga S. Sudjojono, seolah-olah tidak ada tokoh perempuan yang layak dimasukkan dalam narasi utama perkembangan seni di Indonesia.

Adapun, popularitas seniman perempuan sering kali dibayang-bayangi oleh figur laki-laki, entah sebagai ayah, suami, atau mentor. Kartika Affandi, misalnya, seorang pelukis berbakat yang dikenal dengan karya

ekspresifnya, tetap lebih sering dikenal sebagai "anak Affandi" dibandingkan sebagai seniman dengan identitasnya sendiri. Hal yang sama terjadi pada Mangku Muriati, seorang seniman Bali yang karyanya menggambarkan ritual dan spiritualitas dalam perspektif perempuan. Meskipun ia berhasil mengembangkan gaya khasnya sendiri dalam seni Kamasan, posisinya sebagai seniman tak lepas dari pengaruh dan warisan ayahnya, Mangku Mura, seorang maestro seni tradisional Bali. Nama besar sang ayah sering kali membayangi identitasnya, sebagaimana yang terjadi pada banyak seniman perempuan lainnya.

Hal serupa juga dialami oleh Kustiyah, seorang pelukis dengan karakter visual yang khas, yang juga merupakan istri dari pematung legendaris Indonesia, Edhi Sunarso. Meskipun Kustiyah memiliki gaya yang unik dan eksplorasi warna yang khas dalam karyanya, namanya tidak pernah benar-benar berdiri sendiri—ia lebih sering disebut sebagai "istri Edhi Sunarso". Di tengah dominasi seni patung yang menjadikan suaminya terkenal dengan karya-karya monumental seperti Monumen Selamat Datang dan Monumen Dirgantara, eksistensi Kustiyah sebagai pelukis seakan terpinggirkan. Nama besar suaminya sebagai pematung nasional seolah menutupi ruang apresiasi terhadap karyanya sendiri, sebuah pola yang sering dialami oleh perempuan seniman dalam dunia seni rupa Indonesia. Bahwa perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang subordinat, alih-alih diakui sebagai individu yang memiliki pencapaian artistik tersendiri. Keterlibatan mereka dalam seni tetap dibingkai dalam relasi domestik dan familial.

Bias gender dalam seni juga diperkuat oleh anggapan lama seperti kelakar Basoeki Abdullah, bahwa "perempuan lebih cocok menjadi obyek lukisan daripada menjadi pelukisnya". Pernyataan ini mencerminkan bagaimana perempuan dalam dunia seni sering kali dikonstruksikan sebagai sesuatu yang "dilihat" dan "diabadikan," bukan sebagai kreator utama. Perempuan dianggap lebih pas menjadi inspirasi daripada pencipta karya seni itu sendiri. Akibatnya, meskipun banyak perempuan telah berkontribusi dalam perkembangan seni, posisi mereka dalam historiografi seni tetap berada dalam bayang-bayang laki-laki.

Jika kesenian kontemporer masih menyisakan ruang (terbatas) bagi perempuan, situasi berbeda terjadi dalam kesenian tradisional, yang seringkali didefinisi sebagai "kerajinan" (bukan seni tinggi). Seperti pada batik dan tenun. Kain tenun Sumba, ulos Sumatra Utara, atau batik Pekalongan dan Lasem merupakan warisan budaya yang sebagian besar dibuat oleh perempuan. Meski demikian, pengrajin-pengrajin ini tidak dikenal namanya, seolah hanya menjadi latar dalam sejarah seni tekstil Indonesia. Sejarah batik yang panjang sejak masa lalu hingga saat ini menjadi salah satu warisan dunia, hanya merekam nama-nama pengrajin itu di balik tembok-tembok bengkel Dimana mereka berkarya. Seolah hanya menjadi latar dalam sejarah seni budaya Indonesia.

Dari Latar ke Layar

Ketimpangan ini bukan sekadar narasi masa lalu, tetapi masih terus berlanjut hingga hari ini. Keterbatasan ruang pameran, kurangnya dukungan finansial, dan minimnya pengarsipan yang mencantumkan nama mereka dalam sejarah seni nasional menjadi kendala yang sistemik. Namun, refleksi HPI ini seharusnya tidak hanya terbatas pada dunia seni. "Dari latar ke layar" bukan sekadar metafora untuk posisi perempuan dalam kesenian, tetapi juga cerminan dari kondisi perempuan dalam berbagai aspek

kehidupan. Begitu banyak perempuan yang selama ini menjadi penggerak utama dalam keluarga, masyarakat, bahkan ekonomi bangsa, tetapi mereka tetap berada di latar, tersembunyi di balik narasi besar yang lebih sering dikendalikan oleh laki-laki. Tak salah dengan ungkapan dari Maya Angelou: seorang penulis, penyair, dan aktivis hak sipil Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa *“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”* (Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan).

HPI adalah momentum untuk memastikan bahwa kisah-kisah perempuan tidak lagi dibungkam, bahwa suara mereka tidak hanya didengar tetapi juga diperhitungkan. Ini adalah saatnya untuk menegaskan bahwa perempuan berhak atas panggung mereka sendiri. Hari-hari peringatan seperti ini akan selalu relevan, tetapi tidak boleh berhenti pada sekedar seremoni tahunan. Perayaan tanpa perubahan hanyalah omong kosong. Diperlukan langkah konkret yang membawa perempuan dari bayang-bayang ke cahaya pengakuan. Maka, terjadilah seperti yang dikatakan Kartini, *“Habis Gelap, Terbitlah Terang.”*